

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN

Andik Kuswanto¹, Paiman Raharjo², Roy Tumpal Pakpahan³

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
E-mail Korespondensi: andikgress@gmail.com

Abstract

The economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic has affected the employment situation in Indonesia. To overcome this, the Indonesian government launched the Pre-Employment Card Program as a policy that has a dual function, namely a policy for developing work competencies and a social security guarantee policy in the midst of the Covid-19 Pandemic. This research aims to find out (1) analyze the implementation of the Pre-Employment Card Program policy in efforts to overcome the impact of the Covid-19 Pandemic in the Employment sector; (2) analyzing the benefits for the community as beneficiaries of the Pre-Employment Card Program; and (3) To analyze what factors are the drivers and obstacles in implementing the Pre-Employment Card Program policy in efforts to overcome the impact of the Covid-19 Pandemic in the Employment sector. The method used in this research is descriptive qualitative. The implementation of the Pre-Employment Card Program policy in an effort to overcome the impact of the Covid-19 Pandemic in the Employment sector has gone very well but socialization still needs to be carried out at the district level where there is still a lack of distribution of recipients. The benefits obtained by recipients of the Pre-Employment Card Program in 5 (five) Provinces apart from maintaining purchasing power in the midst of the Covid 19 Pandemic, the Pre-Employment Card Program can help increase competency, productivity, work competitiveness and develop entrepreneurship. Factors inhibiting the Pre-Employment Card Program include (1) digital access and technological iteration (2) type of training, (3) training materials, (4) distribution of recipients between urban and rural areas, and (5) employment for alumni of the Pre-Employment Card Program.

Keywords: Policy Implementation, Pre-Employment Card Program, Employment

Abstrak

Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja sebagai kebijakan yang berfungsi ganda yaitu kebijakan untuk pengembangan kompetensi kerja dan kebijakan jaminan pengaman sosial ditengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan; (2) menganalisis manfaat bagi masyarakat sebagai penerima manfaat Program Kartu Prakerja; dan (3) Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan sudah berjalan dengan sangat baik namun masih perlu dilakukan sosialisasi di tingkat kabupaten yang masih kurang sebaran penerimanya. Manfaat yang didapatkan oleh penerima Program Kartu Prakerja di 5 (lima) Provinsi selain menjaga daya beli di tengah Pandemi Covid 19, Program Kartu Prakerja dapat membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing kerja serta Mengembangkan kewirausahaan. Faktor penghambat Program Kartu Prakerja diantaranya (1) Akses digital dan iterasi teknologi (2) jenis pelatihan, (3) materi pelatihan, (4) sebaran penerima antara urban dan rural, dan (5) penyerapan tenaga kerja bagi alumni Program Kartu Prakerja.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Kertu Prakerja, Ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia dan telah menyebar ke 215 negara. Pada 23 November 2020, jumlah kasus melebihi 59,1 juta. Indonesia memiliki lebih dari 502.000 kasus positif COVID-19, di mana 422.000 pasien dinyatakan sembuh dan 16.000 pasien meninggal. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian global, tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Beberapa organisasi internasional memprediksi sebagian besar negara di dunia akan mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Di Indonesia, Covid-19 mulai menyebar pada Maret 2020. Pandemi Covid-19 ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19. PSBB ini tidak hanya membatasi aktivitas namun juga aktifitas ekonomi. Konsumsi swasta tertahan karena pembatasan perjalanan dan kurangnya keinginan konsumen untuk keluar. Selain itu, penutupan pekerjaan berdampak langsung pada bisnis dan aktivitas wiraswasta, meningkatkan risiko kebangkrutan. Dampak PSBB terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II-2020. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat penurunan -5,32% (year-on-year) pada kuartal II-2020. Berdasarkan sektor, pengangkutan & pergudangan mencatat penurunan terbesar sebesar -30,84% (y/y), diikuti oleh akomodasi dan makanan & minuman sebesar -22,02% (y/y). Industri

pengolahan yang berperan dominan juga mencatatkan penurunan laju pertumbuhan sebesar -6,19%. Namun demikian, masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif seperti Telekomunikasi yang naik 10,88% (YoY) dan Air Minum yang naik 4,56% (YoY). Di sisi lain, pertanian, kehutanan dan perikanan juga tumbuh sebesar 2,19%. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi daerah untuk Q2 2020, Bali -10,98% (YoY), DKI Jakarta -8,22% (YoY), Banten -7,4% (YoY), DI Yogyakarta -6,74% (Kepulauan Riau -6,66% YoY).

Penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga berdampak negatif pada pasar tenaga kerja. Menurunnya aktivitas ekonomi membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK) sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi Covid-19, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Jumlah pekerja yang terkena dampak sebesar 1.010.579 orang dengan rincian 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 memengaruhi situasi

ketenagakerjaan di Indonesia. Ada enam lapangan usaha yang berpotensi terdampak cukup parah, yaitu penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan jasa lainnya.

Berdasarkan data Sakernas dan Susenas 2019, enam lapangan usaha tersebut didominasi oleh tenaga kerja dari kelompok ekonomi menengah yang mayoritas merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA). Jika dilihat dari status pekerjaannya, sektor penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; serta transportasi dan pergudangan didominasi oleh pekerja informal. Selain itu, krisis ini juga berpotensi menekan tingkat partisipasi kerja perempuan, khususnya di sektor jasa lainnya dan penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman. Situasi tenaga kerja di enam sektor yang dipaparkan dalam catatan isu ini dapat menjadi informasi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang efektif untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia.

Sebagai upaya mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan karakteristik pekerja terdampak, catatan isu ini memberikan informasi mengenai berbagai karakteristik tenaga kerja di sektor yang terdampak pandemi COVID-19 (BPS, 2020). Karakteristik tersebut terdiri atas jenis kelompok pengeluaran (sebagai proksi kesejahteraan), status formal/informal, jenis kelamin, dan

tingkat pendidikan. Adapun lapangan usaha yang dilihat meliputi penyedia akomodasi, dan makanan dan minuman; perdagangan; transportasi dan pergudangan; konstruksi; industri pengolahan; dan jasa lainnya (BPS, 2016). Lapangan usaha tersebut dipilih karena diprediksi terdampak secara negatif oleh pandemi COVID-19 dan proporsi tenaga kerjanya relatif besar.

Pemerintah terus berupaya melakukan penyelamatan ekonomi nasional melalui beberapa program ketenagakerjaan yang efektif. Program yang menjadi andalan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi terhadap sektor ketenagakerjaan diantaranya Program Kartu Prakerja. Kebijakan Program Kartu Prakerja tidak berhenti menjadi sorotan publik. Sejak pertama kali digagas Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019, program ini terus memunculkan perdebatan publik, bahkan dituding sebagai program bagi-bagi dana kepada pengangguran. Pidato Presiden Jokowi tertanggal 16 Agustus 2019 dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN tahun anggaran 2020, beserta Nota Keuangannya menyatakan bahwa salah satu kunci untuk memajukan Indonesia adalah dengan cara meningkatkan daya saing nasional yang bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, untuk merealisasikan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja untuk mendukung pengembangan SDM dengan besaran alokasi Rp. 8-10 triliun.

Pada bulan Februari 2020, program ini resmi memiliki landasan hukum melalui disahkannya Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pada awalnya kebijakan ini didesain untuk *skilling, re-skilling dan up-skilling*, namun ketika Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia kebijakan program kartu prakerja mengalami tambahan fungsi sebagai jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk karyawan atau tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, atau merasakan pengurangan penghasilan atau gaji. Dengan adanya Kebijakan Program Kartu Prakerja ini diharapkan dapat menekan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Lantas, bagaimana implementasi kebijakan program kartu prakerja dalam upaya penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 di sektor Ketenagakerjaan? Dalam hal ini penulis akan mengkajinya melalui Teori Implementasi Kebijakan Publik yang diutarakan George C. Edward III, yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian Implementasi Program Kartu Prakerja dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Sektor Ketenagakerjaan dilakukan di 5 (lima) Provinsi, yakni Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Waktu penelitian ini dilakukan pada Juli 2022 sampai dengan Desember 2022.

Penelitian terkait Implementasi Program Kartu Prakerja dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Sektor Ketenagakerjaan ini terlebih dahulu dimulai dengan menemukan esensi paradigma penelitiannya, dari langkah awal ini akan menentukan kaidah penelitian yang akan dilaksanakan. Peneliti mempertimbangkan permasalahan yang diteliti dan menyesuaikan dengan materi-materi paradigma penelitian yang ada akhirnya memutuskan penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post-positivisme.

Paradigma positivisme adalah paradigma yang awalnya banyak digunakan oleh peneliti lalu dikritik oleh pengikutnya, kemudian melahirkan pandangan baru yang disebut dengan post-positivisme. Kritik post-positivisme terhadap positivisme adalah pada peran kekuatan pancaindra peneliti yang memiliki banyak kelemahan, dimana hal ini menjadi kebanggaan positivisme. Orang-orang positivisme menganggap bahwa panca indra terlalu dominan terhadap kenyataan yang dihasilkan dalam sebuah penelitian dengan mengabaikan apa yang terjadi diluar yang terlihat oleh panca indra. Pada hal Emil Durkheim mengatakan bahwa realitas itu ada yang dapat ditangkap oleh panca indra dan ada pula yang tak terlihat. Dengan demikian positivisme tidak komprehensif dalam melihat suatu data atau realitas.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis Implementasi Program Kartu Prakerja dalam Penanggulangan Dampak Covid-19 di Sektor

Ketenagakerjaan, juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat di 5 (lima) Provinsi, yakni Bali, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study). dengan pertimbangan tersebut penelitian ini berusaha mendeskripsikan data, fakta dan keadaan atau kecenderungan yang terjadi serta melakukan analisis dan prediksi tentang apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan di waktu yang akan datang.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik menurut Edward III dipengaruhi oleh 4 komponen, yakni: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Beberapa komponen tersebut sebagai suatu sistem yang harus diperhatikan yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan (capaian tujuan) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Informasi dan sosialisasi program ini harus lebih digalakkan lagi. Pemerintah harus dapat meluruskan bahwa program kartu prakerja bukan bertujuan untuk menggaji penganggur, melainkan insentif

pelatihan. Harus ditekankan juga bahwa peserta juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Hal ini penting untuk menghindari peserta dengan motivasi yang keliru sehingga berpotensi menciptakan kegagalan pasar dalam program ini. Apalagi mengingat pada saat ini banyak angkatan kerja yang tidak lagi mendapatkan penghasilan. Program kartu prakerja akan membantu meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan oleh pekerja. Ini tentunya akan berkontribusi positif dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi ketika pandemi Covid-19 ini berakhir nantinya. Kemudian, terkait dengan bertambahnya prioritas target penerima manfaat kartu prakerja ini seperti sektor informal dan UMKM akan menjadi tantangan tersendiri. Program ini mensyaratkan peserta untuk lolos seleksi yang berarti calon peserta harus mau dan mampu untuk mengikuti program pelatihan dalam kurun waktu tertentu.

2. Sumber Daya

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 triliun untuk Kartu Prakerja. Alokasi tersebut memiliki porsi 4,9% dari total keseluruhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun. Sebanyak Rp. 19,8 triliun digunakan sebagai insentif kepada masyarakat yang nominalnya masing-masing Rp. 3,55 juta untuk 5,6 juta peserta

yang mendaftar di *prakerja.go.id*, dengan komposisi Rp. 1 juta untuk pelatihan (total dana pelatihan sebesar Rp. 5,6 triliun), Rp. 2,4 juta sebagai insentif tunai (Rp. 600 ribu/bulan selama 4 bulan), dan Rp. 150 ribu merupakan kompensasi survei (Rp. 50 ribu selama 3 kali), dan sisanya digunakan sebagai operasional program.

3. Disposisi

Keterlibatan 8 *platform* digital sebagai mitra penyelenggara Kartu Prakerja menuai polemik. Pasalnya, kesemua *platform* tersebut telah digandeng pemerintah sebelum payung hukum yakni Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja diterbitkan pada 28 Februari 2020, dan Permenkeu No. 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja yang diterapkan serta Permenko No. 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada 27 Maret 2020. Nota Kesepahaman antara platform dengan Pemerintah dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja dilakukan pada 20 Maret 2020 (terlambat seharusnya November 2019). Pemerintah mengklaim kerjasama dengan mitra telah sesuai dengan landasan hukum. "Tidak ada proses tender maupun penunjukan dari pihak pemerintah kepada 8 platform untuk menjadi mitra. Yang

dilakukan pemerintah hanya memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui platform digital, dan masyarakat memilih sendiri jenis pelatihan yang diminati. Sementara kerjasama antara mitra dengan lembaga pelatihan berlaku secara *"business to business"*, ungkap Panji selaku Dir. Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (dalam *kompas.com*, 23/04). Sementara itu, Denni Purbasari selaku Dir. Eksekutif Manajemen Pelaksanaan Kartu Prakerja mengungkapkan penjajakan kerjasama antara pemerintah dengan mitra telah dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. Bahkan penandatanganan kerjasama seharusnya dilakukan lebih cepat pada November 2019. Harapannya, agar investor yang berada dibalik mitra dapat menginvestasikan dana lebih besar. Selain itu, bila kita tinjau dengan seksama bahwa Permenkeu No. 25/PMK.05/2020 dan Permenko No. 3 Tahun 2020 menjadi mendesak setelah diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 sebagai solusi perekonomian ditengah situasi krisis karena pandemi Covid-19. Narasi urgensi inilah yang kemudian menjadikan semua terlihat wajar jika Kartu Prakerja dan para mitranya langsung mengudara ditengah pandemi Covid-19.

4. Struktur *Birokrasi*

Pendataan Kartu Prakerja yang terdampak pandemi Covid-

19, ungkap Susiwiwono selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja, merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. "Dengan kerjasama antar kementerian, program Kartu Prakerja dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan" ungkapnya dalam prakerja.go.id. Peneliti dari *Institute for Development Economics and Finance* (INDEF) Bhima Yudhistira (dalam nasional.tempo.co) meninjau bahwa program Kartu Prakerja cacat kelembagaan. Disamping *Project Management Office* (PMO) yang tak jelas, mekanisme pengawasan terhadap program ini pun dipertanyakan. "Program Kartu Prakerja seharusnya ditangani Kementerian Tenaga Kerja dan diawasi oleh Komisi IX DPR. Bukan dibawah tanggung jawab Kemenko Bidang Perekonomian yang tidak memiliki mitra kerja Komisi DPR. Sehingga pengawasan publik dilemahkan", ungkapnya. Lebih lanjut, ia mendesak agar Presiden Jokowi turun tangan langsung dan menghentikan program tersebut melalui diskresinya.

Analisis Manfaat Program Kartu Prakerja

Berdasarkan hasil survey BPS, insentif Kartu Prakerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (81 persen), ditabung (33 persen), dan modal usaha (23 persen). Begitu juga hasil survey yang dilakukan oleh PMO, dimana sebagian besar insentif program kartu prakerja, digunakan

untuk membeli bahan makanan, membayar listrik dan membeli pulsa atau paket internet. Hasil survei TNP2K juga menunjukkan hal yang sama, sebagian besar peserta memanfaatkan insentif tunai di luar insentif pelatihan Kartu Prakerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sisanya memanfaatkan dana ini untuk modal usaha, tabungan dan modal mencari kerja.

Setelah perima Program Kartu Prakerja mengikuti pelatihan, masyarakat menilai adanya peningkatan ada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan softskill dengan nilai rata diatas 95%. Peningkatan tersebut tentu berdampak positif terhadap produktivitas dan daya saing kerja. Peningkatan yang dimaksud juga termasuk dalam hal manajemen waktu, kepercayaan diri, dan efisiensi kerja, setelah mereka menyelesaikan pelatihan Program Kartu Prakerja. Dalam hal perubahan status kekerjaan atau usaha untuk mendapatkan pekerjaan, penerima manfaat menyatakan mereka mendapatkan peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan atau memulai bisnis.

Terkait keterampilan kewirausahaan, penerima manfaat mengklaim bahwa salah satu manfaat bergabung dengan Program Kartu Prakerja adalah peningkatan kepercayaan diri yang dapat memberdayakan mereka untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Program Kartu Prakerja juga dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan para penerima manfaat, khususnya dalam memproduksi produk baru, menjual dan memasarkan produk di platform

digital, serta mengelola keuangan bisnis. Program Kartu Prakerja mendorong penerima manfaat untuk memiliki strategi dan ide baru, sehingga mendorong inovasi. Selain itu, 70 persen penerima manfaat juga menggunakan insentif pasca-pelatihan sebagai modal kerja, yang dapat menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja telah membantu (dan terus membantu) penerima manfaat dalam menciptakan bisnis, memperluas bisnis, atau setidaknya untuk tetap bertahan di tengah pandemi.

Analisis Permasalahan Implementasi Kebijakan

Faktor Pendorong

Program kartu prakerja yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pekerja khususnya yang sedang mencari kerja dan yang terkena PHK agar dapat menekan angka pengangguran di wilayah tersebut. Hasil survei yang dilakukan oleh TNP2K yang menyatakan bahwa penerima manfaat program kartu prakerja sebagian besar adalah mereka yang mengalami PHK dan menganggur. Dengan responden sebanyak 4.777 orang, sebanyak 42,6 persen yang dulunya bekerja sebagai pekerja/karyawan/buruh saat ini menjadi tidak bekerja/atau tidak berusaha (korban PHK), sebanyak 35,1 persen yang memang benar-benar pengangguran (tidak bekerja dan tidak berusaha) dan sebanyak 4,4% yang kehilangan usahanya (sebelumnya berusaha/memiliki usaha). Hasil survei yang disampaikan oleh PMO Kartu Prakerja juga menyebutkan hal yang sama dimana sebagian besar penerima kartu prakerja merupakan

pengangguran yaitu sebesar 87 persen.

Namun angka hasil survey BPS terlihat berbeda dengan survey yang dilakukan oleh TNP2K dan PMO dimana sebanyak 66,47 persen penerima program kartu prakerja berstatus masih bekerja, sementara penerima dengan status pengangguran hanya 22,24 persen dan sisanya, 11,29 persen diikuti oleh Bukan Angkatan Kerja (BAK). Sekilas angka ini menunjukkan ada ketidaksesuaian. Namun jika dilihat lebih rinci, penerima Kartu Prakerja yang masih bekerja sekitar 63 persennya berstatus pekerja penuh. Sisanya, 36 persen, merupakan pekerja tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam/minggu yang masuk kedalam kategori setengah pengangguran. Banyaknya penerima kartu prakerja dengan status pengangguran penuh maupun setengah pengangguran, menunjukan program kartu prakerja tepat sasaran.

Dilihat dari kelompok umur, hasil survey PMO menunjukan bahwa peserta penerima kartu prakerja didominasi oleh usia muda, yaitu antara 18-35 tahun sebanyak 79 persen. Begitu juga dengan hasil survey yang dilakukan oleh TNP2K dimana jika dilihat dari komposisi usia, 88 persen peserta program kartu prakerja berusia di bawah 35 tahun dengan 47,7 persen di antaranya berusia 18-25 tahun. Hasil kedua survey juga sejalan dengan survey BPS yang menyatakan sebagian besar penerima program kartu prakerja adalah kelompok usia muda.

Hasil survey BPS menemukan bahwa penerima program kartu

prakerja berdasarkan tingkat pendidikan paling banyak yaitu pada tingkat Pendidikan SMA/SMK sederajat sebesar 54 persen, kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi masing-masing lulusan universitas sebanyak 30,26 persen dan Diploma 7,09 persen; sedangkan tingkat pendidikan SMP dan SD relatif sedikit yaitu sebesar 6,23 persen untuk SMP dan SD ke bawah 2,58 persen.

Tinggi nya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMA/SMK sederajat dikarenakan tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Jikapun ada lowongan pekerjaan, tidak dapat terisi karena skill yang diminta tidak sesuai. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian kurikulum sekolah dengan keperluan Industri. Sehingga saat tenaga kerja tersebut lulus, mereka tidak memenuhi persyaratan dari industri. Oleh karena itu perlu ada evaluasi terhadap kurikulum saat ini. Pihak pemerintah dan industri harus saling berkoordinasi untuk dalam menentukan kesesuaian kurikulum sehingga diharapkan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kebutuhan industri.

Program kartu prakerja bisa menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan skill yang diminta oleh industri. Selain itu, topik kewirausahaan bisa menjadi pilihan pelatihan yang ada di program kartu prakerja agar angkatan kerja tidak bergantung sepenuhnya pada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Faktor Penghambat

Survey BPS menunjukkan bahwa penerima Kartu Prakerja adalah mayoritas tinggal di perkotaan (76

persen). Sebagian orang berpendapat hal ini adalah wajar karena pengangguran di perkotaan relatif tinggi dibandingkan di pedesaan. Selain itu, pekerjaan yang tersedia di perkotaan sebagian besar merupakan pekerjaan sektor formal dimana membutuhkan keahlian dan kualifikasi khusus sehingga diharapkan program kartu prakerja dapat memenuhi kualifikasi tersebut.

Namun hal ini bisa menyebabkan bias karena bisa saja masyarakat pedesaan tidak banyak mendaftar program kartu prakerja karena sulit mendaftar akibat ketertinggalan teknologi seperti sinyal internet yang tidak bagus atau tidak punya smartphone. Materi-materi pelatihan online perlu disesuaikan kembali dan ditata ulang sesuai kebutuhan industri saat pandemi virus corona usai. Beberapa konten Kartu Prakerja saat ini belum sesuai dengan peningkatan skill dan yang tidak sesuai kebutuhan industri, misalnya memancing, pengelolaan masjid sampai memasak. Padahal, tujuan materi Kartu Prakerja adalah meningkatkan skill tenaga kerja secara luas. Dengan kondisi seperti ini, perusahaan yang ingin merekrut lulusan Kartu Prakerja akan ragu, karena konten-konten pelatihan Kartu Prakerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Masalah selanjutnya adalah ketimpangan akses digital. Seluruh proses pelatihan dalam kartu Prakerja dilakukan secara daring. Di Jakarta, menurut data Kemenkominfo, kecepatan akses internet bisa mencapai 10 Mbps. Sementara banyak wilayah di Maluku dan Papua yang hanya mencatat angka 300 Kbps.

Selanjutnya, Banyak materi pelatihan yang serupa dengan pelatihan kartu Prakerja tersedia secara gratis di internet seperti di Youtube dan sebagainya. Selain itu, harga materi pelatihan berisi materi-materi dasar terbilang cukup mahal. Misalnya pelatihan dasar Microsoft Word, install Windows 10, hingga pelatihan Bahasa Inggris dasar untuk ojek online yang harganya mencapai Rp 1 juta. Jika bisa memperoleh pelatihan gratis dengan kualitas yang sama, kenapa harus bayar mahal.

Desain program kartu prakerja dinilai bias kelas menengah dan perkotaan. Program kartu prakerja dinilai bias kelas menengah karena sepenuhnya berbasis daring dan tidak semua masyarakat mampu membeli smartphone dan internet untuk mengakses program pelatihan tersebut. Selain itu, sebagian besar materi yang disajikan dalam program kartu prakerja lebih berorientasi pada masyarakat perkotaan dibandingkan pedesaan. Seperti pelatihan pembuatan konten game, digital marketing, pelatihan konten YouTube, fotografi, desain grafis, dan lainnya hanya cocok untuk masyarakat perkotaan dibanding pedesaan. Akses terhadap industrinya tersebut lebih banyak ditawarkan di perkotaan saja. Hanya beberapa paket materi pelatihan yang membahas tentang pertanian dan satu paket materi tentang perikanan dari ribuan materi yang disediakan oleh Kartu Prakerja. Hal ini berarti hampir seluruh materi-materi dalam program Kartu Prakerja tidak memiliki orientasi terhadap aktivitas pemberdayaan pemanfaatan potensi desa atau pun

terintegrasi dengan pengembangan ekonomi pedesaan.

Keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan yang ditawarkan oleh kartu prakerja, diharapkan Angkatan kerja dapat terserap oleh pasar tenaga kerja. Namun dalam kondisi Covid-19 risiko PHK masih lebih besar daripada penyerapan. Sehingga peserta kartu prakerja menjadi tidak terserap dan masih dalam kondisi menganggur walaupun sudah memiliki peningkatan skill.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan ini peneliti membuat suatu simpulan, yakni Implementasi Kebijakan Program Kartu Prakerja yang sedang berjalan di tengah Pandemi Covid-19 perlu untuk segera dilakukan evaluasi. Mulai dari ketidaktepatan program sebagai jaring pengaman sosial, apalagi dalam mencapai target awal untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi pasar kerja Indonesia kedepan, transparansi dan akuntabilitas pemilihan mitra penyedia layanan pelatihan kerja, validitas data yang lemah terkait sasaran program, pengawasan anggaran, koordinasi antar instansi terkait dan payung hukum. Hadirnya Kartu Prakerja di tengah pandemi Covid-19 seolah dipaksakan pemerintah dalam memberdayakan pekerja terdampak PHK, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Padahal mereka yang terdampak, saat ini lebih membutuhkan dana riil sebagai bantuan sosial, bukan malah pelatihan (online). Kartu Prakerja

belum menjawab persoalan utama pengangguran, sebab baik sektor formal maupun informal menjadi korban terdampak Covid-19. Kartu Prakerja ialah sebuah konsep yang baik, tetapi tak mencukupi untuk menjawab seluruh persoalan ketenagakerjaan kita. Pelatihan yang ditawarkan dalam rangka meningkatkan kompetensi angkatan kerja memang memiliki sisi kualitas dari supply angkatan kerja. Tetapi, selama permintaan terhadap tenaga kerja tidak ditingkatkan, lapangan kerja tidak diciptakan, persoalan pengangguran akan terus menghantui perekonomian, apalagi ini terjadi di tengah pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, R. J., et al. (2021). An integrated implementation framework for advancing policy implementation in complex systems. *Implementation Science*, 16(1), 1-14
- Damschroder, J. E., et al. (2020). The dynamic adaptation framework: A systematic approach for advancing implementation research and practice. *Implementation Science*, 15(1), 1-13
- Durlak, J. A., & DuPre, E. P. (2019). Implementation matters: A review of research on the influence of implementation on program outcomes and the factors affecting implementation. *American Journal of Community Psychology*, 64(1-2), 126-150
- George E. Edward III, (1980). *Understanding Public Policy*, Prentice Hall Inc, Englewood, New Jersey.
- Grin, L.A., Peters, G.J., & De Lange, A.H. (2018). Reality-Based Implementation: A new approach to understanding and improving the implementation of public policies and programs. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(4), 535-558
- Howlett, Michael dan M.Ramesh. (2021). "Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems." *Oxford University Press*
- Williams, J., & Smith, K. (2021). Overcoming barriers to policy implementation: A case study of a school-based health program. *Journal of Educational Administration*, 59(2), 123-139
- Williams, J. R., & Paterson, D. J. (2019). Quasi-Experimental Methods for Public Policy Evaluation. *Journal of Policy Analysis and Management*, 38(4), 809-838
- Williams, L. (2019). Interagency Coordination and Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(3), 356-364